

**ANALISIS PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MENUJU
KEMANDIRIAN DAERAH KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Najmatul Haya Zen

NPP. 30.0204

Asdaf Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: najmatulhaya5@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Paryoto, SE., MM

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research departed from the low regional financial independence of Solok City, West Sumatra Province. **Purpose :** of this study was to describe the causes of the regional financial independence of Solok City area. While the data used in this research is the Budget Realization Report (LRA) Solok City area in 2018- 2021. The data collection techniques used were interviews with 6 people from the regional financial management division of Solok City and documentation with related documents. **Method :** uses a qualitative approach with inductive thinking using several financial ratios, namely, the ratio of the effectiveness of PAD management, the ratio of the degree of decentralization, the ratio of regional financial dependence and the ratio of regional financial independence. **Results/Findings :** showed that the factors that caused the regional financial independence of Solok City were: 1) Local Original Income was still low due to the not yet maximizing tax collection and the lack of awareness of taxpayers to pay their obligations; 2) The amount of Mandatory spending that must be fulfilled by the local government; and 3) The existence of national budget politics which causes a reduction in regional revenue potential. **Conclusion:** made by the regional government of Solok City in overcoming these factors are: 1). Efforts to increase the Regional Original Income (PAD) of Solok City by; increasing the capacity of the source of Regional Original Income (PAD), simplifying the systems and procedures for collecting local taxes and levies including strengthening the regulations governing the collection of local taxes and levies, making efforts to increase compliance regional taxpayers and levy payers followed by increased control and supervision over the collection of Regional Original Revenue (PAD) which is realized by improving the quality, convenience, accuracy, and speed of services; 2) Efforts to overcome the large number of Mandatory spending that must be fulfilled by the regional government are carried out by carrying out good budget planning management according to the priority of regional needs; 3) Efforts to overcome the existence of national budget politics, namely by re-coordinating the policies made and asking for a large portion of the regional government. **Keywords:** Budget Politics, Local Government, Regional Original Income, Mandatory Spending.

Keywords: Budget Politics, Local Government, Regional Original Income, Mandatory Spending

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): berangkat dari rendahnya kemandirian keuangan daerah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. **Tujuan :** penelitian ini adalah mendeskripsikan penyebab tidak mandirinya keuangan daerah Kota Solok. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Solok tahun 2018-2021. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan 6 orang dari bidang pengelolaan keuangan daerah Kota Solok dan dokumentasi dengan dokumen terkait. **Metode :** penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara berfikir induktif menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu, rasio efektivitas pengelolaan PAD, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio Analisis varians Pendapatan, dan Rasio Analisis varians Belanja. **Hasil/Temuan:** penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak mandirinya keuangan daerah Kota Solok adalah : 1) Pendapatan Asli Daerah masih rendah yang dikarenakan belum maksimalnya pemungutan pajak tersebut dan masih kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk membayar kewajibannya; 2) Banyaknya *Mandatory spending* yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah; dan 3) Adanya politik anggaran nasional yang menyebabkan berkurangnya potensi pendapatan daerah. **Kesimpulan:** Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Solok dalam mengatasi faktor tersebut adalah: 1). Upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok dengan; menambah kapasitas sumber Pendapatan Asli daerah (PAD), mempermudah sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk memperkuat peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah, melakukan upaya peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah diikuti dengan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diwujudkan dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan; 2) Upaya mengatasi banyaknya *Mandatory spending* yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dilakukan dengan melakukan manajemen perencanaan anggaran yang baik disesuaikan dengan prioritas kebutuhan daerah; 3) Upaya mengatasi adanya politik anggaran nasional yaitu dengan mengkoordinasikan kembali kebijakan yang dibuat dan meminta porsi yang besar bagi pemerintah daerah.

Kata kunci: *Mandatory Spending*, Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Politik Anggaran

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang seluas-luasnya dalam rangka pembangunan daerah serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dengan jumlah penduduk 270.054.853 juta jiwa (sejumlah 63,36 juta atau sekitar 25% penduduk indonesia terdiri

dari pemuda), merupakan aset besar dalam proses pembangunan bangsa Indonesia ke depan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019). Generasi muda Indonesia sebagai tonggak terdepan memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan literasi masyarakat yang dimulai dari daerahnya masing-masing.

Selanjutnya dengan diberikannya wewenang bagi daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah diharapkan daerah mampu mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri khususnya pada bidang ekonomi. Sehingga dengan demikian diharapkan mampu menciptakan daerah dengan daya saing yang tinggi, masyarakat yang sejahtera, serta pembangunan dengan infrastruktur yang memumpuni. Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat dikategorikan mampu melaksanakan otonomi, meliputi:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah dituntut mampu menggali dan memberdayakan segala potensi serta sumber daya yang dimiliki daerah sebagai sumber pendapatan baru bagi daerah tersebut sehingga mampu menciptakan kemandirian bagi daerah tersebut dalam pelaksanaan kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan analisis terhadap kemampuan keuangan daerah melalui penelitian dengan judul : “Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Menuju Kemandirian Daerah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kota Solok merupakan wilayah otonom pada tingkat provinsi, sehingga Kota Solok berhak melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri. Pelaksanaan urusan pemerintahan dilaksanakan sesuai kondisi daerah masing-masing dengan menggunakan anggaran yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer dari pusat. Namun Kota Solok masih bergantung dengan dana transfer dari pusat, sehingga persentase antara dana transfer ke daerah dengan pendapatan daerah masih besar untuk mendanai urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pembangunan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daerah yang memiliki pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang baik maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut berhasil dalam memberdayakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada dasarnya berasal dari potensi daerah itu sendiri sehingga mampu memperbaiki pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik lagi. Karena pada hakikatnya, daerah maju tidak hanya bergantung pada dana yang bersumber dari pemerintah pusat, melainkan daerah tersebut mampu menciptakan kemandirian daerah yang baik melalui sumber daya manusia yang memumpuni dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia di daerah secara optimal.

Berikut tabel yang menunjukkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2018-2021 :

**Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah
Kota Solok T.A 2018-2021**

| Tahun | Pendapatan Daerah (Rp) | PAD (Rp) | Kontribusi PAD (%) |
|-------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 2018 | 577.187.055.174,00 | 49.000.000.000,00 | 8,48 |
| 2019 | 638.338.572.096,78 | 49.620.110.133,60 | 7,77 |
| 2020 | 540.488.881.083,00 | 37.184.206.989,00 | 6,87 |
| 2021 | 544.481.063.638,00 | 42.182.038.866,00 | 7,74 |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran T.A 2018-2021 (data diolah Penulis, 2022)

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa data total pendapatan daerah dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terjadi kenaikan dan penurunan, dan bahkan cenderung menurun pada tiap tahunnya namun pada tahun 2019 total pendapatan daerah mengalami peningkatan. Akan tetapi dari penurunan dan peningkatan yang terjadi, pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dikarenakan kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada pendapatan daerah bisa dikatakan sangat minim hanya sekita 8% bahkan tidak sampai pada angka 10%. Hal itu menunjukkan bahwa Kota Solok masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

Dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan Kota Solok dalam 4 (empat) tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021 masih sangat kecil. Jika dilihat dari persentasenya, maka dana transfer dari pusat masih berada diatas angka 70%. Sehingga menjelaskan bahwa rendahnya pendapatan asli daerah Kota Solok selama 4 (empat) tahun anggaran tersebut. Sehingga berpengaruh pada ketergantungan pemerintah daerah Kota Solok terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Penyelenggaraan otonomi daerah Kota Solok permasalahan tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja. Jika dibiarkan, maka pada waktu tertentu Kota Solok akan dianggap gagal dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu pemerintah Kota Solok harus segera mengatasi permasalahan tersebut agar dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Selain itu juga diperlukan analisis terhadap kemandirian keuangan daerah untuk melihat kemampuan keuangan daerah Kota Solok dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya memberikan gambaran singkat tentang hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya pada topik yang hampir sama dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian Nobuo Akai dan Masayo Sakata

Tulisan ini memberikan bukti baru bahwa desentralisasi fiskal memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyangkal kontribusi tersebut. Data tingkat negara bagian kami yang baru untuk Amerika Serikat memungkinkan kami memperkirakan pengaruh desentralisasi fiskal secara lebih objektif daripada sebelumnya, karena kumpulan data menunjukkan sedikit variasi budaya, sejarah, dan kelembagaan. Kami juga memberikan temuan bahwa definisi desentralisasi fiskal penting dalam kaitannya dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Skripsi Dian Istyaningtias

Penelitian ini meneliti tentang analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Jawa Tengah tahun 2010-2014 menggunakan rasio keuangan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas yang terbagi menjadi dua yaitu rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan, dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini

menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan setiap rasio keuangan daerah.

Dalam rasio kemandirian untuk tingkat kabupaten se-Jawa Tengah, kabupaten Blora memiliki tingkat kemandirian paling rendah karena hanya memiliki rata-rata hanya 9% sedangkan kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tegal berada pada tingkat kemandirian paling tinggi dengan prosentase sebesar 18%. Sedangkan untuk tingkat kota, kota Pekalongan berada pada posisi terendah dengan prosentase sebesar 18% dan kota Tegal berada pada posisi tertinggi dengan prosentase sebesar 33%

3. Penelitian R. Agoes Kamaroellah

Penelitian yang berjudul Analisis Tingkat kemampuan Keuangan Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan di Kabupaten Pamekasan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pamekasan. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tahun anggaran 2011-2015. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan dan dokumentasi

4. Penelitian Nimas Agustin, Abdul Wahid, dan M Cholid

Penelitian berjudul Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2015 yang memiliki hasil Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2013-2015 dengan hasil tingkat rata-rata sebesar 27.80%, menggambarkan kinerja masih sangat rendah sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah dan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah pada tahun 11 2013-2015 dengan perolehan rata-rata efektivitas pendapatan daerah tahun anggaran 2013-2015 sebesar 38.23% sesuai dengan kriteria penilaian efektifitas yang kurang efektif. Maka pemerintah daerah harus meningkatkan output (hasil) yang optimal dan memberikan penggambaran kinerja pemerintah daerah yang lebih baik.

5. Penelitian Ni Kadek Novia Indrawati P dan Ni Putu Ayu

Penelitian yang berjudul Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan atau sering disebut dengan wilayah Sarbagita. Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan (wilayah Sarbagita) dengan metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode sampling jenuh. Pengumpulan data menggunakan metode observasi non partisipan dengan cara observasi pada laporan realisasi Anggaran pemerintah belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Sarbagita tahun anggaran 2012-2016 dengan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yaitu pertumbuhan PAD Kota Solok yang mana penelitian sebelumnya tentang pengaruh PAD dan dana perimbangan. Merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana tercantum dalam table 2.1 di atas, dalam dapat diberikan keunggulan yang sekaligus menjadi pembeda dari penulisan skripsi. Penelitian di atas memiliki kesamaan seperti kesamaan focus penelitian di bidang keuangan maupun kesamaan metode pengukur yang digunakan hingga perbedaan yang terdapat pada lokus dan juga Teknik dalam pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan. Kelebihan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ada dalam penggunaan data yakni menggunakan data

keuangan Kota Solok pada tahun anggaran 2018-2021 dimana penelitian sebelumnya kebanyakan menggunakan data keuangan 2011-2019 saja.

1.5. Tujuan.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sKota Solok selama periode 2018-2021.

II. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metodologi deskriptif dan pendekatan induktif, karena dalam penelitian ini menganalisis permasalahan berdasarkan keadaan yang sebenarnya serta dilakukan secara sistematis. Jenis penelitian ini adalah eksploratif yang bertujuan agar penelitian dapat memperoleh informasi dan data sesuai yang dibutuhkan, sehingga dapat menunjang penelitian permasalahan kemandirian keuangan yang terjadi di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Menurut Creswell (2016: 4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang- dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penulis mengumpulkan data melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Sekretaris daerah Kota Solok, kepala badan keuangan daerah (BKD), sekretaris badan keuangan daerah (BKD), kbid anggaran badan keuangan daerah (BKD), Kepala Bidang Pendapatan Daerah BKD, Kepala Subbidang Perencanaan BKD, dan Kepala Subbidang Akuntansi BKD. Adapun pengumpulan data Kuantitatif dilaksanakan dengan mengumpulkan laporan realisasi anggaran (LRA) kota solok tahun anggaran 2018-2021. Adapun analisisnya menggunakan teori analisis rasio keuangan yang digagas oleh Mahmudi (2019) yang menggunakan beberapa analisis rasio keuangan yaitu rasio efektifitas pengelolaan PAD, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Penulis menganalisis pertumbuhan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah menggunakan teori analisis rasio keuangan yang digagas oleh Mahmudi (2019) yang menggunakan beberapa analisis rasio keuangan yaitu rasio efektifitas pengelolaan PAD, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kasmir (2008, 104) yang menyatakan bahwa: Analisis rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya, dimana analisis rasio keuangan dan kinerja perusahaan, dan dari hasil rasio keuangan tersebut akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Untuk melihat perkembangan kemampuan keuangan daerah, digunakan beberapa rasio keuangan untuk mendapatkan penilaian yang lebih objektif Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektifitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas, maka menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan yang semakin baik. Tingkat efektifitas dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

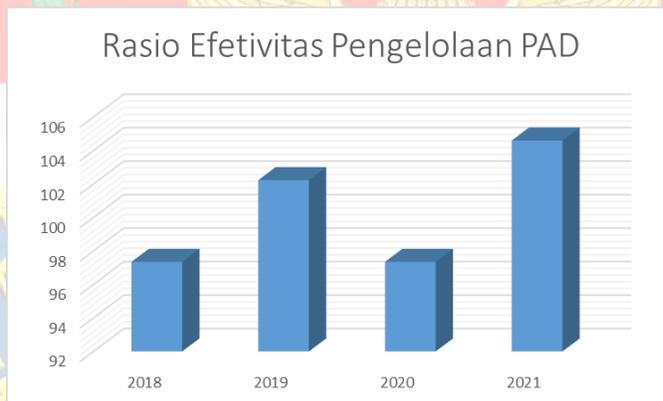
Berdasarkan rumus di atas, maka untuk menghitung Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut perhitungan dan grafik rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok tahun anggaran 2018 sampai 2021:

Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun 2018-2021

| Tahun | Target Penerimaan PAD | Realisasi Penerimaan PAD | Rasio Efektifitas | Kriteria |
|-------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| 2018 | 40.742.809.270,40 | 41.852.774.058,12 | 97,35% | Sangat Efektif |
| 2019 | 40.742.809.270,40 | 41.651.875.802,05 | 102,23% | Sangat Efektif |
| 2020 | 41.651.875.802,05 | 40.546.983.369,47 | 97,35% | Sangat Efektif |
| 2021 | 40.546.983.369,47 | 42.410.154.725,27 | 104,6% | Sangat Efektif |

Sumber: LRA Kota Solok

Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok Tahun 2018-2021



Sumber : data diolah dari LRA APBD Kota Solok tahun 2018-2021

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat secara umum tingkat efektivitas pengelolaan PAD sangat efektif, karena berada dalam kategori 75% - 89%. Maka dengan presentase rata-rata 100,38 %, pengelolaan PAD Kota Solok dinyatakan sangat efektif. Efektifitas pengelolaan PAD meningkat pada tiap tahun anggarannya. Penjelasan dari Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Solok bahwa “pengelolaan Pendapatan Asli daerah (PAD) harus terus ditingkatkan pada tiap tahun anggarannya. Dan untuk Kota Solok sudah mulai mencapai bahkan melebihi target yang ditargetkan, ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat signifikan dalam pengelolaan efektifitas keuangan

3.2. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi menjelaskan kemampuan sebuah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Rasio ini menjelaskan tentang derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, semakin

tinggi kontribusi PAD semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi di pemerintahan. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Dengan menggunakan rumus tersebut maka diketahui bahwa derajat desentralisasi menggambarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal ini APBD Kota Solok. Berikut grafik rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Solok

Rasio Desentralisasi Kota Solok Tahun 2018-2021



Sumber : data diolah dari LRA APBD Kota Solok 2018-2021

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa rasio derajat desentralisasi Kota Solok mengalami kenaikan selama empat tahun anggaran 2018 sampai tahun anggaran 2021. Rasio Derajat Desentralisasi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 7,43%. Rata-rata derajat desentralisasi Kota Solok selama 4 tahun anggaran berada pada presentase 7,19%.

Hasil perhitungan derajat desentralisasi Kota Solok dengan rata-rata 7,19%, jika dilihat dalam skala interval berada pada skala 00-10. Dapat disimpulkan bahwa rasio derajat desentralisasi Kota Solok tahun anggaran 2018- 2021 masih berada pada kriteria sangat kurang. Dengan keadaan demikian, dapat dikatakan bahwa Kota Solok masih lemah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta masih memiliki ketergantungan keuangan yang tinggi kepada pemerintah pusat dalam membiayai urusan tersebut. Halim (2004) berpendapat bahwa “Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah“.

3.3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Derajat ketergantungan keuangan daerah melalui perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah. Pada dasarnya tujuan dari perhitungan dalam rasio ini sama dengan rasio kemandirian keuangan, yaitu untuk mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan eksternal khususnya

pedapatan transfer. Namun ada sedikit perbedaan yaitu dari segi cara penghitungannya, dimana cara penghitungan rasio ketergantungan keuangan daerah ini adalah kebalikkan dari cara penghitungan dari rasio kemandirian keuangan daerah, dan terdapat sedikit perbedaan dalam hal komponen yang diukur. Pengukuran ini bisa memperkuat hasil penghitungan kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau provinsi, dan begitu juga sebaliknya. Berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah adalah :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat dilihat bahwa untuk mengetahui tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat diketahui dengan membandingkan antara pendapatan transfer dengan total pendapatan, Disinilah letak perbedaan rasio ini dengan rasio kemandirian keuangan. Rasio kemandirian keuangan lebih menekankan pada pendapatan asli daerah, sementara rasio ini menggunakan total pendapatan. Berikut grafik rasio ketergantungan daerah Kota Solok :

Rasio Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun 2018 – 2021



Sumber : data diolah dari LRA APBD Kota Solok Tahun 2018-2021

Berdasarkan gambar 4.4 diketahui bahwa rasio derajat ketergantungan keuangan daerah Kota Solok mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2019 yaitu sebesar 91,27% . Pada tahun anggaran 2020 terjadi penurunan dari tahun 2019 yaitu dari 91,27% menjadi 90,46%. Kemudian untuk tahun anggaran 2021 terjadi penurunan dari tahun menjadi 90,04%. Penurunan ini dipengaruhi oleh besarnya pendapatan transfer daerah tersebut. Total pendapatan daerah cenderung mengalami kenaikan pada tiap tahun anggarannya. Sehingga yang berpengaruh terhadap derajat ketergantungan keuangan daerah adalah pendapatan transfer suatu daerah.

Hasil perhitungan derajat ketergantungan keuangan daerah Kota Solok rata-rata sebesar 90,64%, jika diukur dengan skala presentase derajat ketergantungan keuangan daerah berada pada skala >50%. Hal ini dapat diartikan bahwa rasio derajat ketergantungan keuangan daerah Kota Solok berada pada

kriteria ketergantungan sangat tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keuangan daerah Kota Solok masih bergantung pada pendapatan transfer.

3.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah menyebabkan ketergantungan daerahnya menjadi tinggi dan akan berpengaruh pada kemandirian keuangan daerahnya. Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dihitung menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana yang berasal dari pihak eksternal pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan tersebut ditentukan oleh besar kecilnya rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah. Rasio kemandirian keuangan yang tinggi menunjukkan bahwa rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang berasal dari pihak eksternal. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat rasio kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah maka itu menunjukkan semakin tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang bersumber dari pihak eksternal pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan sebagai patokan dari kemandirian keuangan daerah tersebut. dengan kata lain juga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah akan memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah juga. Berikut grafik rasio kemandirian keuangan Kota Solok tahun anggaran 2018-2021:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2018-2021



Sumber : data diolah dari LRA APBD Kota Solok 2018-2021

3.5 Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah menuju Kemandirian Daerah Kota Solok

1. Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah

Kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Rendahnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.

Penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut juga disebabkan oleh berbagai alasan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi “Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Berdasarkan peraturan tersebut, jelas dinyatakan bahwa besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kewenangan daerah untuk menentukannya, dengan keleluasan yang diberikan. Pendapatan Asli daerah (PAD) yang masih kecil akan menimbulkan indikasi bahwa kurangnya kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang lebih besar.

Penjelasan dari Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Solok, rendahnya kemandirian keuangan daerah Solok ini karena masih sedikitnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih sedikit atau rendah disebabkan oleh faktor berikut :

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih sedikit, sehingga pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Diketahui bahwa daerah Kota Solok merupakan wilayah pertanian dan perkebunan. Hal ini menyebabkan jumlah objek pajak di Kota Solok hanya sedikit. Selain itu jumlah objek yang dapat menghasilkan retribusi juga masih sedikit.
2. Aturan atau regulasi yang mengatur tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kurang mengikat, sehingga pemungutan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah menyebabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bergantung pada pendapatan transfer yang mengakibatkan Daerah tidak mandiri secara finansial. Memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada total pendapatan daerah dapat meningkat sehingga kemandirian keuangan daerah dapat meningkat juga.

2. *Mandatory spending*

Tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan asli daerah. Untuk membiayai belanja daerah nya tersebut Kota Solok masih bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya Mandatory spending yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

Kemampuan keuangan daerah yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah masih sangat didominasi oleh besarnya kontribusi dana yang berasal dari pihak eksternal yakni pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut berupa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Besarnya dana transfer tersebut juga disebabkan oleh banyaknya Mandatory spending yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan harus dipenuhi. Dengan banyaknya Mandatory spending yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, maka semakin banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran tersebut termasuk kedalam rincian belanja daerah pada tiap tahun anggarannya.

3. *Politik Anggaran Nasional*

Pendapatan daerah Kota Solok dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terjadi kenaikan dan penurunan, dan bahkan cenderung meningkat pada tiap tahunnya namun pada tahun 2020 total pendapatan daerah mengalami penurunan. Akan tetapi dari penurunan dan peningkatan yang terjadi, pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer. Hal itu menunjukkan bahwa Kota Solok masih sangat

bergantung pada dana transfer dari pusat. Salah satu yang menyebabkan ketergantungan dengan dana transfer yaitu beberapa potensi daerah yang sudah diserahkan wewenangnya kepada pemerintah pusat hal ini juga disebut dengan Politik Penganggaran Nasional.

Pemerintah pusat memberikan kebijakan otonomi daerah bagi seluruh daerah di Indonesia dengan tujuan tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan dengan tujuan untuk mencegah ketimpangan antara daerah yang pendapatannya rendah dengan daerah yang pendapatannya tinggi. Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 terdapat perbedaan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kebijakan pemerintah pusat tersebut belum memberi ruang yang luas kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik. Terjadinya politik anggaran salah satu contohnya yaitu banyaknya jenis pajak yang potensinya besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kewenangan pusat, bukan menjadi kewenangan daerah. Pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pemerintah pusat. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan Perhutanan dan Pertambangan. Dimana dengan kondisi geografis Kota Solok, maka potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten ini terletak pada pertanian, perkebunan, dan perhutanan. Namun pendapatan dari potensi tersebut telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Dapat diambil kesimpulan bahwa terlepas dari tujuan pemerintah pusat melakukan politik penganggaran, salah satu penyebab ketergantungan keuangan daerah di Kota Solok adalah banyaknya potensi pendapatan yang besar namun dikelola pemerintah pusat. Sehingga berpengaruh pada kemandirian keuangan daerahnya

3.6 Upaya Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah menuju Kemandirian Keuangan Daerah Kota Solok

1. Upaya dalam meningkatkan PAD

- a. Pendataan potensi sumber pendapatan asli daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk menambah sumber pendapatan asli daerah. Termasuk melakukan monitoring pajak restoran/ rumah makan dan membenahi tempat-tempat parkir dipasar yang belum terkoordinir pemerintah daerah.
- b. Pembaharuan data wajib pajak termasuk pendataan wajib pajak baru dan penetapan ulang besarnya pajak yang harus di bayarkan.
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan pajak mulai dari pendapatan dan ditebitkannya OPD hingga diterimanya setoran pajak pada kas daerah.
- d. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama para wajib pajak terhadap kewajibannya, melalui kegiatan penyuluhan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah
- e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan dinas terkait daerah.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok juga terdapat kebijakan yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Menyebarkan Surat Pembayaran Objek Pajak (SPOB) PBB ke masyarakat yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan tetapi belum dikenakan PBB.
- b. Mengadakan rapat evaluasi pencapaian penerimaan PBB dengan para Kepala OPD, Camat dan Kepala Kampung/Lurah setiap 1 bulan sekali.

- c. Memberikan informasi Kepala Kampung/Lurah dan Camat yang presentase pelunasan PBB di wilayahnya paling tinggi.
- d. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memiliki kesadaran membayar pajak serta sedang mengembangkan pembayaran pajak secara online.
- e. Melakukan Penemoelan sticker kepada objek yang terlambat atau memiliki kesadaran yang rendah untuk membayar pajak

Selain meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi yang dimaksimalkan, pemerintah daerah Kota Solok juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah. Terdapat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Solok yaitu:

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Natsir Kota Solok
2. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kota Solok

Dari 2 BUMD tersebut yang memiliki kontribusi cukup baik bagi pendapatan daerah Solok yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BUMD lainnya masih belum memberikan kontribusi yang cukup besar dikarenakan masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Maka dari itu pemerintah harus selalu mencari dan mengembangkan inovasi-inovasi baru lainnya yang tujuannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah khususnya Kota Solok.

2. Upaya dalam mengatasi *mandatory spending*

Ketertanggung keuangan daerah pada dana transfer dari pusat untuk memenuhi Mandatory spending yang diberikan pemerintah pusat harus dikurangi. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi ketertanggung keuangan daerah terhadap dana transfer dari pusat adalah dengan memperbaiki perencanaan. Perencanaan penganggaran pada satu tahun anggaran harus difokuskan pada prioritas kebutuhan daerah. Mandatory spending merupakan salah satu prioritas anggaran pengeluaran daerah yang wajib di penuhi.

Selain itu pernyataan tersebut juga didukung oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan yang mengatakan bahwa “dengan membuat prioritas anggaran yang baik dapat mengurangi beban pengeluaran keuangan daerah sehingga mengurangi ketertanggung daerah terhadap pusat”.

Dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengatasi ketertanggung keuangan daerah terhadap dana transfer dari pusat yaitu dengan memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan dengan membuat proiritas anggaran yang baik sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran bagi keuangan daerah.

3. Upaya dalam mengatasi Politik anggaran nasional

Terjadinya politik anggaran perlu dilakukan upaya untuk mengatasinya. Upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dan asosiasi pemerintah daerah untuk meminta pemerintah memberikan porsi yang besar kepada daerah dalam menerapkan otonomi di daerahnya. Sesuai pernyataan dari Sekretaris Daerah Kota Solok yang mengatakan “inikan politik pemerintahan yang didesain agar kewenangan pemerintah pusat tetap dominan. Secara normatif solusinya adalah asosiasi yang dilakukan pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif agar mendesak pemerintah untuk memberikan porsi yang besar kepada daerah untuk penerapan otonomi di daerahnya”.

Dengan demikian upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi politik anggaran tersebut dengan melakukan koordinasi kembali terkait kebijakan tersebut.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Derajat desentralisasi menjelaskan kemampuan sebuah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Rasio ini menjelaskan tentang derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, semakin tinggi kontribusi PAD semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi di pemerintahan. Kota Solok masih lemah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta masih memiliki ketergantungan keuangan yang tinggi kepada pemerintah pusat dalam membiayai urusan tersebut. Penulis menemukan temuan penting yaitu pentingnya daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan rumah tangga pemerintahannya agar tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Sama halnya dengan temuan Nobuo Akai dan Masayo Sakata (2016) definisi desentralisasi fiskal penting dalam kaitannya dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi..

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah menyebabkan ketergantungan daerahnya menjadi tinggi dan akan berpengaruh pada kemandirian keuangan daerahnya. Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dihitung menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana yang berasal dari pihak eksternal pemerintah daerah, layaknya temuan Nimas Agustin, Abdul Wahid, dan M Cholid (2019) Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2015 yang memiliki hasil Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2013-2015 dengan hasil tingkat rata-rata sebesar 27.80%, menggambarkan kinerja masih sangat rendah sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah dan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah pada tahun 2013-2015 dengan perolehan rata-rata efektivitas pendapatan daerah tahun anggaran 2013-2015 sebesar 38.23% sesuai dengan kriteria penilaian efektifitas yang kurang efektif. Maka pemerintah daerah harus meningkatkan output (hasil) yang optimal dan memberikan penggambaran kinerja pemerintah daerah yang lebih baik.

Hasil penelitian yang ditemukan peneliti bahwa sistem yang dilaksanakan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah juga sangat penting dalam peningkatan total pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.

KESIMPULAN

1. Pertumbuhan PAD Kota Solok berdasarkan 6 (enam) dimensi tersebut dapat disimpulkan mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2018 terjadi penurunan PAD sebesar 2,64% dari PAD pada tahun anggaran 2017 penurunan ini juga terjadi pada tahun anggaran 2020 yang mengalami penurunan PAD dari tahun 2019 sebesar 2,65% penurunan ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah pada tahun tersebut. Namun pada tahun anggaran 2021 PAD Kota Solok mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 4,59% dari tahun anggaran 2020.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kemandirian keuangan daerah Kota Solok adalah a) efektifitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah masih belum maksimal pada beberapa tahun anggaran yang disebabkan oleh belum sesuainya realisasi anggaran terhadap target; b) Derajat desentralisasi yang masih tinggi yang diakibatkan oleh Rendahnya penempatan asli daerah Kota Solok; c) Ketergantungan Daerah yang sangat tinggi terhadap bantuan dana transfer pusat yang diakibatkan oleh banyaknya Mandatory spending yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan Adanya politik anggaran nasional yang menyebabkan berkurangnya

potensi pendapatan daerah; d) Kemandirian daerah yang masih sangat rendah disebabkan oleh faktor derajat desentralisasi yang tinggi dan ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi

3. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Solok yaitu:

- a. Upaya dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah masih belum maksimal pada beberapa tahun anggaran yang disebabkan oleh belum sesuainya realisasi anggaran terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Solok adalah dengan menetapkan target yang mampu di realisasikan oleh pemerintah
- b. Upaya dalam mengatasi tingginya ketergantungan keuangan akibat Mandatory spending yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dilakukan dengan melakukan manajemen perencanaan anggaran yang baik disesuaikan dengan prioritas kebutuhan daerah. Upaya mengatasi adanya politik anggaran nasional yaitu dengan mengkoordinasikan kembali kebijakan yang dibuat dan meminta porsi yang besar bagi pemerintah daerah.
- c. Upaya dalam meningkatkan kemandirian daerah adalah dengan meminimalkan derajat desentralisasi dan ketergantungan terhadap dana transfer.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni Rentan waktu yang digunakan hanya lima tahun sehingga terkesan kurang maksimal dalam melakukan penelitian dan Sampel yang digunakan terbatas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi dalam meningkatkan PAD.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah daerah kota solok beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

Akai, Nobuo, and Masayo Sakata. "Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross-Section Data for the United States." *Journal of Urban Economics*, vol. 52, no. 1, 2002, pp. 93–108, doi:10.1016/S0094-1190(02)00018-9.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.

Istyaningtias, Dian. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2014*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Kamaroellah, R. Agoes. "Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, vol. 14, no. 1, 2017, p. 123, doi:10.19105/nuansa.v14i1.1316.

Kasmir. (2008). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.

Mahmudi. 2010. *Analisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
_____. 2016. *Analisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
_____. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Erlangga.
Ni Kadek Novia Indrawati Putri, dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2019). “*Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan*”. E-Jurnal Manajemen. 8.
Pemerintah Kota Solok. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2019.
Pemerintah Kota Solok. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2020.
Pemerintah Kota Solok. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2021.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

